



Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri

**“DAYA LAKU (AGENSI) ORGANISASI PEREMPUAN BERBASIS AGAMA
DALAM MENCEGAH EKSTREMISME BERKEKERASAN”**

Penulis:

DEBBIE AFFIANTY

NIDN: 0326017403

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

2021

DAYA LAKU (AGENSI) ORGANISASI PEREMPUAN BERBASIS AGAMA DALAM MENCEGAH EKSTREMISME BERKEKERASAN

Debbie Affianty

Latar Belakang

Ekstremisme berkekerasan yang mengarah pada terorisme sudah mulai terjadi di Indonesia sejak terjadinya peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 dengan laki-laki sebagai pelakunya. Namun demikian, 14 tahun setelah peristiwa tersebut, pelibatan perempuan dalam tindakan terorisme mulai terjadi seiring dengan kemunculan para pengikut ISIS di Indonesia. Upaya aksi bom bunuh diri oleh Dian Yulia Novi di Istana Presiden dengan menggunakan *high-pressure cooker* pada 10 Desember 2016, membuka rangkaian pelibatan aktif perempuan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia sampai dengan tahun 2021. Peristiwa Bom Makassar oleh pasangan suami istri dan upaya penyerangan Mabes Polri yang dilakukan oleh perempuan pada tahun 2021 telah menambah daftar panjang pelibatan perempuan dalam aksi bom bunuh diri di Indonesia.

Pelibatan perempuan dalam aksi terorisme oleh kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia berjalan pada dua aras, yaitu maskulinisasi dan feminisasi.¹ Pada proses maskulinisasi, perempuan mengambil posisi di garis depan sebagai eksekutor bom bunuh diri dan peran-peran di garda depan lainnya. Proses maskulinisasi telah membuat peran perempuan dalam kelompok ekstremisme berkekerasan mulai bergeser dari peran-peran tradisionalnya sebagai pendamping yang setia, ibu dari calon-calon “petempur” dan pendidik bagi mereka. Beberapa perempuan dalam kelompok ekstremisme berkekerasan mulai aktif sebagai agen propaganda, agen rekrutmen, agen penggalangan dana, dan pelaku bom bunuh diri.²

Pada proses feminisasi, pola aksi kelompok ekstremisme berkekerasan, bukan lagi bergeser dari individu laki-laki dewasa kepada individu perempuan dewasa, melainkan dari individu laki-laki atau perempuan dewasa kepada keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Feminisasi kelompok ekstremisme berkekerasan terjadi ketika perempuan dalam perannya sebagai ibu dengan karakter femininnya dimanfaatkan oleh kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya. Ibu yang memiliki ideologi yang kuat atas ekstremisme kekerasan berperan penting dalam meyakinkan anak-anaknya untuk melakukan bom bunuh diri bersama. Ini terlihat pada peristiwa serangkaian bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo

¹ Lies Marcoes, *Merebut Tafsir*, Yogyakarta: Amongkarta, 2021, hal. 279-281.

² Debbie Affianty, *Perempuan dalam Kelompok Teroris dan Terorisme*, dalam Muhammad Abdullah Darraz (Ed), *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2017.

yang melibatkan tiga keluarga, termasuk para istri dan anak-anak mereka pada 13-14 Mei 2018.

Kelompok ekstremisme berkekerasan juga menasar pekerja migran perempuan asal Indonesia untuk direkrut, seperti Dian Yulia Novi, Ika Puspitasari dan Anggi Indah Kusuma. Ika (berusia 35 tahun pada saat ditangkap pada 15 Desember 2016), mendanai rencana serangan bom yang akan dilakukan oleh dua orang laki-laki. Sementara itu Anggi mengajari suaminya untuk merancang bom yang akan diledakkan di Pindad, Bandung pada tahun 2017. Penelitian terhadap 25 pekerja migran perempuan Indonesia yang menjadi pengikut ISIS menunjukkan *religious pathway* mereka ada yang memiliki afiliasi keagamaan ke Nahdlatul Ulama (tiga orang) dan Muhammadiyah (lima orang).³

Walaupun terkesan perempuan saat ini menjadi korban atau pelaku (peran *promoter*) dari ekstremisme berkekerasan namun mereka sebenarnya juga mampu melakukan upaya-upaya pencegahan (peran *preventer*). Berdasarkan hal tersebut, INFID memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana daya laku (agensi) ormas perempuan berbasis keagamaan dalam pencegahan ekstremisme berkekerasan. Saat ini upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan negara (*state security*) yang bersifat *hard approach* namun kini lebih berfokus pada upaya pencegahan dengan menggunakan pendekatan *human security* atau *soft approach*. Dalam hal ini perempuan diharapkan dapat berperan besar dalam upaya-upaya pencegahan, termasuk dalam mempromosikan kohesi sosial dan moderasi beragama di tingkat akar rumput. Penelitian ini memiliki tujuan yang sejalan dengan rancangan aksi pada Pilar Pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam Prepres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE serta Peraturan Menteri KPPPA No. 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme.

Definisi dan Metodologi

Ekstremisme berkekerasan adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020-2024). Kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat (3)). Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat (UU No 5 Tahun 2018, Pasal 1 ayat (4)).

Terkait dengan ekstremisme berkekerasan, penelitian ini ingin melihat sejauh mana daya laku (agensi) ormas perempuan berbasis keagamaan dalam melakukan upaya pencegahan ekstremisme berkekerasan. Hal ini sejalan dengan rancangan aksi pada Pilar Pencegahan

³ Nava Nuraniyah, *Not Just Brainwashed: Understanding the Radicalisation of Indonesian Female Supporters of the Islamic State*, Terrorism and Political Violence, 2018, hal. 890-910.

sebagaimana diamanatkan dalam Prepres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE. Perempuan saat ini bukan saja sebagai korban atau pelaku (peran *promoter*) dari ekstremisme berkekerasan namun mampu melakukan upaya-upaya pencegahan (peran *preventer*).

Daya laku (agensi) menurut Saba Mahmood, adalah kapasitas untuk menyadari kepentingan seseorang dalam menghadapi tekanan adat-istiadat, tradisi, kehendak transedental atau hambatan lainnya baik pribadi maupun kolektif.⁴ Selanjutnya, konsep daya laku dapat disamakan dengan kehendak bebas (*free will*) tanpa dibatasi secara sosial.⁵ Daya laku sebagai *path*, selalu ditentukan oleh struktur (negara, ideologi, dsb) yang menentukan apa yang akan dan ingin dilakukan. Di NU dan Muhammadiyah, perempuan memiliki daya laku (agensi) yang tinggi sehingga dapat tampil di depan umum dengan leluasa. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok ekstremisme berkekerasan yang memiliki agensi yang rendah akibat adanya struktur yang dominan.

Daya laku (agensi) perempuan dalam ormas perempuan berbasis keagamaan maupun non keagamaan dalam penelitian ini, jika berdasarkan teori tindakan Pierre Felix Bourdieu,⁶ maka terkait dengan *field*, *habitus* dan *capital*. *Habitus* dalam hal ini adalah kesadaran pimpinan ormas perempuan tersebut akan ancaman bahaya ekstremisme berkekerasan. *Habitus* adalah ruang intelektual untuk interpretasi. Sedangkan *field* adalah ruang atau ranah terdapat upaya pencegahan ekstremisme berkekerasan, dan apakah ruang ini memberi kesempatan yang terbuka atau tidak untuk terjadinya upaya pencegahan tersebut. Tindakan teror, termasuk bom bunuh diri merupakan aktualisasi simbolisme ideologi yang kompleks. Karenanya, terorisme menjadi ajang perebutan ruang, baik ruang interpretasi keagamaan, ruang fisik untuk aksi, maupun ruang kemanusiaan untuk citra dan penilaian. Perebutan ruang fisik untuk aksi dan ruang intelektual untuk interpretasi merupakan perkara penting. Ruang-ruang ini adalah *habitus* dan *field*.

Sementara itu, *capital* atau modal diartikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan, seperti modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Untuk mencegah ekstremisme berkekerasan diperlukan modal simbolik berupa ideologi dan teologi. Hukum dan teologi Islam adalah modalitas paling utama yang sering digunakan oleh kalangan ekstremisme berkekerasan. Modalitas berupa tafsir dari ayat suci dan aturan-aturan dalam Islam akan membuat perempuan dari ormas berbasis keagamaan memiliki daya laku yang kuat dalam melakukan pencegahan munculnya dan menyebarnya kelompok ekstremisme berkekerasan. Pengeboman gereja Surabaya adalah bentuk bagaimana nilai-nilai diinternalisasi ke dalam diri dan kemudian dieksternalisasi menjadi aksi. Tindakan pencegahan ekstremisme berkekerasan tentu didahului oleh sebuah internalisasi nilai. Maka harus ada upaya konsumsi nilai-nilai tertentu yang diyakini sebagai kebenaran, dalam hal ini yang merujuk pada dasar agama, yaitu hukum maupun teologi yang dipahami, khususnya pemahaman dan tindakan yang akan dilakukan terhadap pihak yang dipersepsi sebagai kader mereka.

⁴ Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and The Feminist Subject*, UK: Princeton University Press, 2005.

⁵ Kalpana Wilson, *Reclaiming "Agency", Reasserting Resistance*, Institute of Development Studies (IDS) Bulletin Vol. 39, Number 6, December 2008.

⁶ Loic Wacquant, Pierre Bourdieu and Rob Stones (ed.), *Key Contemporary Thinkers*, London and New York: Macmillan, 2006.

Selama bulan Januari-Maret 2021, penelitian ini berlangsung di Provinsi Jawa Barat (Bandung, Depok, Bogor dan Bekasi), Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Selatan), Provinsi Jawa Tengah (Surakarta dan Salatiga), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur (Surabaya, Malang dan Lamongan) dengan melibatkan sekitar 75 informan kunci. Informan kunci pada penelitian ini adalah organisasi sayap perempuan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial-kemasyarakatan. Berdasarkan tahun berdirinya, ormas perempuan berbasis keagamaan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Aisyiyah, yang didirikan pada 19 Mei 1917 dan beranggotakan perempuan berusia di atas 40 tahun. Selanjutnya adalah Nasyiatul Aisyiyah (NA) yang berdiri pada 16 Mei 1931 dan beranggotakan perempuan berusia 17-40 tahun. Kedua organisasi ini merupakan organisasi otonom (ortom) dari Muhammadiyah. Selanjutnya adalah Muslimat NU yang didirikan pada 29 Maret 1946 yang beranggotakan perempuan berusia di atas 40 tahun. Selanjutnya adalah Fatayat NU yang didirikan pada 24 April 1950 dan beranggotakan perempuan muda berusia maksimal 40 tahun. Kedua organisasi ini adalah badan otonom (banom) dari Nahdlatul Ulama.

Selain ormas perempuan keagamaan, penelitian ini juga mewawancarai perwakilan dari ormas perempuan non keagamaan, seperti Srikandi Lintas Iman (SRILI) di Yogyakarta, AMAN Indonesia kantor Jawa Tengah dan Jawa Timur, Yayasan Percik Salatiga, dan Simpul Rahima di Jawa Timur. Untuk melihat keterlibatan ormas perempuan keagamaan di masyarakat, penelitian ini juga mewawancarai perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Jawa Timur, Duta Damai Jawa Timur, Locus Perdamaian (Jawa Timur), serta institusi Pendidikan seperti UIN Bandung, Institut Agama Islam Tabah, Lamongan dan Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah di Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan pusat, wilayah (provinsi), daerah (kabupaten/ kota) dan cabang (kecamatan) dari ormas perempuan berbasis keagamaan dan non keagamaan tersebut. Selain itu juga dilakukan penelusuran literatur dan dokumen-dokumen yang terkait dengan aktivitas mereka terkait dengan pencegahan ekstremisme berkekerasan, termasuk membangun perdamaian dan harmonisasi umat beragama, serta kampanye moderasi beragama.

Temuan Penelitian

1. Pengetahuan atau kesadaran ormas perempuan berbasis keagamaan dan non keagamaan tentang ekstremisme berkekerasan

Semua ormas perempuan baik yang berbasis keagamaan maupun non keagamaan yang menjadi informan dalam penelitian ini menolak keras ekstremisme berkekerasan dan menyadari bahwa hal tersebut adalah masalah serius yang perlu segera ditangani dan dicegah penyebarannya. Namun demikian, ada perbedaan tingkat keterancaman antara ormas perempuan yang berafiliasi dengan NU dibandingkan dengan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Muslimat NU dan Fatayat NU menganggap ancaman ekstremisme berkekerasan adalah nyata dan “dekat” sementara Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah merasa perlu adanya kehati-hatian dalam menyikapi hal tersebut, terutama penggunaan definisi

radikalisme, ekstremisme berkekerasan dan terorisme ketika menunjuk kelompok-kelompok tertentu. Hal ini disebabkan masih rendahnya *trust* terhadap aparat keamanan dan sikap negara serta pengaruh teori konspirasi.

2. Respons ormas perempuan berbasis keagamaan dan non keagamaan terhadap ekstremisme berkekerasan

Ormas perempuan berbasis keagamaan dan non keagamaan yang diteliti dalam penelitian ini merespons ekstremisme kekerasan dengan berfokus pada dua fokus utama, yaitu penguatan faktor protektif (untuk melindungi anggotanya) dan peningkatan kemampuan untuk mencegah faktor resiko (ancaman dari luar). Faktor-faktor ini termasuk upaya membentuk nilai-nilai keluarga dan masyarakat, mempengaruhi pembuatan keputusan dari yang berpotensi untuk direkrut, mengidentifikasi dan mengintervensi tanda-tanda awal dari radikalisasi yang mengarah kepada terorisme, mendakwahkan toleransi beragama, menggunakan berbagai bentuk media untuk mempromosikan kontra narasi, dan melibatkan polisi perempuan terlibat dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan informasi.

2.a. Internalisasi nilai-nilai Islam untuk daya tahan (resiliensi) anggota organisasi terhadap potensi terpapar ajaran ekstremisme berkekerasan

Muslimat NU dan Fatayat NU mengacu pada kebijakan PBNU untuk memperkuat daya tahan anggotanya dari ancaman ajaran kelompok ekstremisme berkekerasan, yaitu dengan melakukan penguatan terhadap nilai-nilai *Aswaja* (Ahlu Sunah wal Jamaah). Ajaran *Aswaja* mengajarkan Islam yang *tawassuth* (moderat), *tawazun* (imbang), *i'tidal* (adil), dan *tasamuh* (toleran). Selain itu juga nilai-nilai *Mabadi' Khaira Ummah* yang mencakup kejujuran (*ash-shidqu*), dapat dipercaya (*Al-amanah wal-Wafa' bil-Ahdi*), tolong-menolong (*At-ta'awun*), keadilan (*Al-Adalah*), serta konsisten (*Al-Istiqamah*). Selain itu juga ajaran trilogi ukhuwah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan Maqashidusy Syariah, Wathoniyah (kebangsaan) yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara, dan insaniyyah (kemanusiaan) yang tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai HAM. Fatayat DI Yogyakarta, misalnya, kemudian menerjemahkan dengan mempromosikan nilai-nilai moderatisme, toleransi, persaudaraan dalam NU, yaitu persaudaraan di dalam Islam, sesama anak bangsa dan sesama manusia, dengan *tagline* "Fatayat Moderat dan Bersahabat".

Demikian juga dengan 'Aisyiyah dan Nasyiatul 'Aisyiyah yang mengacu pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Selain membahas tentang akidah, HPT merangkum keputusan Munas Tarjih tahun 2003 yang meliputi etika politik, etika bisnis, pengembangan putusan Tarjih, pornografi dan pornoaksi, serta masalah hisab-rukyyat. HPT juga merangkum putusan Munas Tarjih tahun 2010 yang meliputi fikih tata kelola, tuntunan seni budaya, beberapa masalah ibadat dan muamalat, serta pedoman hisab Muhammadiyah. HPT juga memuat keputusan Munas Tarjih tahun 2014 M yang meliputi fikih air dalam perspektif Muhammadiyah, tuntunan menuju keluarga sakinah, dan tuntunan manasik haji serta keputusan Munas Tarjih tahun 2015 yang meliputi tuntunan salat lima waktu dan fikih kebencanaan. Kedua organisasi sayap perempuan ini juga tunduk pada konsep *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah* sebagai hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015. Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila merupakan negara perjanjian atau kesepakatan, karena dasar-dasarnya dihasilkan

dari sebuah konsensus nasional. Indonesia dianggap negara persaksian, di mana Muhammadiyah harus aktif melakukan kebajikan sebagai bagian dari tanggung-jawab bangsa. Sehingga dalam menanggapi isu radikalisme dan intoleransi ini Aisyiyah dan NA, sebagai organisasi otonom Muhammadiyah menganggap tidak ada ruang lagi bagi upaya-upaya yang menawarkan sistem negara yang berbeda, misalnya khilafah.

Untuk lebih menanamkan nilai-nilai moderatisme, Aisyiyah membuat buku “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah” pada tahun 2000 yang memberikan tuntutan kepada anggotanya dari pusat hingga cabang dan ranting tentang bagaimana beragama, bermasyarakat, sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk sampai dengan seni dan budaya. Buku ini beserta nilai-nilai di dalamnya disosialisasikan kepada anggota Aisyiyah setiap kali pengajian, dipergunakan untuk menciptakan “Keluarga Sakinah. Peran perempuan Aisyiyah dalam pembinaan keluarga sakinah dimulai dengan pembinaan aspek agama, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Peran perempuan dalam keluarga inilah yang diharapkan Aisyiyah menjadi sebagai faktor resiliensi paham ekstremisme kekerasan dan sarana promosi perdamaian yang juga diharapkan dapat menanam dan mengajarkan pentingnya memberikan pendidikan agama, memahami keberagaman dan perdamaian, serta menanamkan pentingnya norma keragaman.

Selain melakukan penguatan ideologi, proses pelaksanaan program ‘Aisyiyah menggunakan kerangka program *Qaryyah Thayyibah* (QT) untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan menguatkan ketahanan keluarga melalui program keluarga sakinah (KS) sebagai dasar pengembangan organisasi untuk penguatan kembali (revitalisasi) cabang dan Ranting (PCR). Adapun pengertian *Qaryyah Thoyyibah* adalah suatu perkampungan dimana masyarakatnya menjalankan ajaran Islam secara baik dalam segala aspek kehidupannya yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan *mu’amalah duniawiyah* untuk mewujudkan masyarakat yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Di dalam program QT, terdapat lintas majelis dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pemberdayaan pada masyarakat. Selain QT, terdapat juga keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang pada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai serta bahagia dalam mengusahakan kesejahteraan dunia akhirat.

Sedangkan Pimpinan Pusat Nasyyatul Aisyiyah (PPNA) berfokus pada sosialisasi 10 pilar pada panduan tentang Keluarga Muda Tangguh Nasyyatul Aisyiyah (KMTNA) yang diterbitkan pada tahun 2016. Ke-10 pilar tersebut, yaitu: (1) Kokoh Akidah dan Akhlakul Karimah; (2) Sehat Jasmani, Rohani, dan Lingkungan; (3) Kemandirian; (4) Keadilan Dengan Semangat *Al-Ma’un*; (5) Misi Perdamaian; (6) Demokrasi; (7) Anti Kekerasan; (8) Kesetaraan Akses; (9) Ramah Lingkungan/*Ecofamily*; dan (10) Tanggap Bencana. Nasyyatul Aisyiyah mempunyai program *Mothers School* yang ditujukan untuk pencegahan paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada tahun 2015-2016. Program ini merupakan kerjasama antara Nasyyatul Aisyiyah dengan *Women Without Borders Wina*. Program unggulan NA saat ini adalah Parenting Class, Nasyyah Tanggap Bencana, Pashmina (Pelayanan Remaja Sehat NA), Workshop Manajemen Organisasi, TOT Kewirausahaan untuk BUANA (Badan Usaha Amal Nasyyatul Aisyiyah) dan peran pengusaha Nasyyah melalui APUNA (Asosiasi Pengusaha Nasyyatul

Aisyiyah), Literasi Sosial Media, Pelatihan Kepemimpinan, dan Simposium Internasional Perempuan Muda Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muslimat NU pada tahun 2019 juga mengeluarkan buku “Ketahanan Keluarga Masalah” yang berprinsip bahwa segala kebaikan berawal dari keluarga. Konsep keluarga *masalah* adalah keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting di tengah masyarakat. Unsur-unsur Pembentukan keluarga *masalah* adalah membina kemaslahatan keluarga (*maslahih usrah*) dan mengembangkan kemaslahatan umum (*maslahih} ‘ammah*). Walaupun melakukan upaya untuk kemaslahatan umat, namun tidak mengabaikan keluarga sendiri. Buku ini juga memberikan pemahaman kepada perempuan khususnya bahwa perempuan tidak hanya bekerja di ruang domestik saja, tetapi juga bisa di sektor publik.

Demikian juga Fatayat NU Yogya, misalnya, membentuk Garda Fatayat (GarFat). Para kader Fatayat mendapatkan pelatihan agar mampu melakukan pencegahan radikalisme di internal Fatayat serta daerahnya. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan membuka hotline pengaduan kasus radikalisme dari kader fatayat ke pengurus fatayat. Sementara itu Fatayat NU Jawa Timur membuat modul Gerakan Sehat Fatayat Santri Nusantara (Gafantara) yang memuat enam pilar, yaitu aksi peduli sanitasi, pola hidup bersih dan sehat, peduli makanan dan kosmetik halal, pencegahan *stunting*, kesehatan reproduksi, serta sehat rohani dan menangkal radikalisme.

Sementara itu, Srikandi Lintas Iman (Srili) yang berdiri pada tahun 2015, menyelenggarakan program “Udar Prasangka” untuk internal anggota Srili dengan melakukan diskusi untuk mengetahui pemahaman masing-masing anggota, termasuk membongkar prasangka yang terkadang masih dimiliki para anggotanya.

2.b. Eksternalisasi nilai-nilai internal untuk memperkuat toleransi dan mencegah ekstremisme berkekerasan

Pada tahun 2015, PP Fatayat NU meluncurkan Forum Daiyah (juru dakwah perempuan) Fatayat (FORDAF) dengan misi mempersiapkan para daiyah untuk mengedepankan nilai-nilai yang berimbang, toleran, dan adil dalam dakwah mereka. Fatayat Yogya mengadakan workshop Anti Radikalisme agar daiyah-daiyah Fatayat yang terjun ke akar rumput memiliki pengetahuan tentang isu-isu radikalisme, intoleransi, dan moderasi beragama. Pada tahun 2017, sejumlah 500 Daiyah Fatayat NU Jawa Barat dilantik oleh Kepala BNPT sebagai wujud sinergitas pemerintah dengan ormas perempuan keagamaan dalam pencegahan radikalisme dan ekstremisme. PP Fatayat kemudian membuat program 1000 da’iyah antri radikalisme dan mengadakan *workshop-workshop* terkait serta TOT hingga tersusun modul “Dakwah *Rahmatan lil ‘Alamin* untuk Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme” pada tahun 2019. Selain itu Fatayat NU juga bekerja sama dengan Kemenag RI dalam pembuatan modul “Moderasi Beragama” dan bekerjasama dengan KEMENDES untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas mental dan spiritual da’iyah di wilayah transmigrasi (pemahaman islam yang kurang).

Fatayat NU DIY membangun kerjasama dengan masjid-masjid kampus untuk memberikan materi Islam yang moderat, *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dan *tasamuh* (sikap toleran). Selain itu juga mengadakan Kemah Bocah Lintas Iman, Pena Tasamuh, yaitu mengawal akun medsos organisasi yang menarasikan islam damai serta mengadakan Kontes Pemilihan Duta Santri. Fatayat NU DIY juga menyelenggarakan kompetisi Juru Bicara Narasi Damai di Masyarakat di kalangan anak muda, lomba Komik Anti Hoaks dan Narasi Damai, Konser Budaya untuk Perdamaian, dan Pelatihan Kupas Tuntas tentang Radikalisme.

Fatayat NU Jawa Timur bekerja sama dengan IAI Tabah Lamongan dalam melakukan pendampingan kepada deportan anak (bekerjasama dengan C-Save). IAI Tabah juga melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para ibu yang di wilayahnya banyak orang yang berangkat ke Suriah. Fatayat NU Jawa Timur juga melakukan program deteksi dini dengan bekerjasama dengan C-Save di Surabaya. Anak Cabang Fatayat NU di Gunung Anyar, Surabaya, berkoordinasi dengan Lurah dan Camat dalam mengadakan pengajian anti radikalisme. Di institusi pendidikan yang berafiliasi dengan Fatayat NU, diberikan pembekalan kepada guru-guru sebulan sekali. Dalam kontrak kerja, meskipun pengajar berpaham lain, mereka wajib mengikuti kegiatan NU. Pada tahun 2020-2021, Fatayat NU Jawa Timur dan Fatayat NU Jawa Barat membantu penyusunan Panduan Teknis Penanganan & Pendampingan Deportan & Returni Perempuan & Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme, bekerjasama dengan INFID.

PP 'Aisyiyah memiliki program Modul Madrasah Perempuan Berkemajuan, dengan materi tentang *Darul Ahdi wa Syahadah/NKRI* sebagai bentuk final negara Indonesia, *manhaj Muhammadiyah*, peran Aisyiyah dalam perjalanan bangsa Indonesia, kepemimpinan perempuan, dan literasi informasi. Modul ini sudah diajarkan ke sejumlah provinsi di Indonesia. Untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin*, Nasyyatul Aisyiyah Yogya mengadakan pelatihan kepada *mubalighah* agar menggunakan prinsip yang rahmah dalam berdakwah. Fatayat DIY bekerjasama dengan Nasyyatul Aisyiyah Yogya menyelenggarakan "Deklarasi Damai Perempuan DIY" pada tahun 2018 untuk mengenalkan isu toleransi, radikalisme dan terorisme dengan melibatkan pemerintah setempat. Sasaran peserta adalah komunitas perempuan lintas iman, komunitas penghayat, dan difabel. Sementara itu Yayasan Percik Salatiga menginisiasi gerakan Katahawa yang merupakan salah satu bentuk gerakan lintas agama yang mengumpulkan tokoh-tokoh perempuan lintas agama untuk disatukan dalam satu kegiatan tertentu, seperti seminar mengenai perempuan sampai dengan bakti sosial.

AMAN Indonesia membuat program Sekolah Ibu di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada perempuan untuk melawan narasi ekstremis. Selain itu juga melakukan kampanye perdamaian di kampus dengan *flashmob* serta kursus singkat tentang radikalisme dan ekstremisme di Jawa Tengah.

Di Jawa Timur, AMAN Indonesia melakukan *Ngguyu Project*, lomba kompetisi video Komedi Damai, bekerjasama dengan Duta Damai Jawa Timur. Di Jawa Timur, AMAN Indonesia membuat Sekolah Perempuan Berkreatif di Komunitas Syi'ah (bekerjasama dengan Lakpesdam NU). Selain itu juga membuat Sekolah Perempuan Perdamaian (bekerjasama dengan Fatayat) di Malang.

Organisasi perempuan, seperti Fatayat NU, dan Yayasan Percik Salatiga, memberikan contoh-contoh praktik baik dalam upaya mempromosikan moderasi beragama, kerukunan antarumat beragama, serta ketahanan terhadap ekstremisme dan radikalisme melalui kontra narasi, pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial perempuan, dakwah sejuk (memberikan narasi alternatif yang baik dan lembut), serta, juga memanfaatkan berbagai media kreatif seperti *board game*.

Sedangkan program-program Aisyiyah, Muslimat NU dan Nasyyatul Aisyiyah, belum secara spesifik ditujukan untuk pencegahan ekstremisme berkekerasan. Mereka lebih mengedepankan promosi moderasi beragama dan kerukunan antarumat beragama. Meskipun demikian kedua kelompok organisasi itu telah menyelipkan materi pencegahan ekstremisme ke dalam program lain yang relevan, baik dalam peningkatan pengetahuan keagamaan maupun penguatan daya tahan keluarga. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *Moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.⁷

Aisyiyah melalui institusi pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi berupaya menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai toleransi. Demikian juga Muslimat NU, Fatayat NU dan Nasyyatul Aisyiyah yang juga memiliki institusi pendidikan usia dini. Pondok modern Muhammadiyah di Lamongan, Jawa Timur menyisipkan *story telling* tentang keberagaman dan toleransi beragama dalam pelajaran sekolah. Selain itu juga mengundang guru tamu dari negara lain yang berbeda agama dan budaya agar para siswa mengenal perbedaan. Aisyiyah di Jawa Timur melakukan penguatan ideologi Islam *washatiyyah* oleh Majelis Tabligh dan Majelis Pengkaderan. Kemudian juga mengajarkan Islam Berkemajuan di sekolah-sekolah Muhammadiyah serta mengisi kajian keIslaman di RRI Malang. Aisyiyah juga memiliki Forum *Mubalighah* dan merupakan salah satu dari 25 organisasi dalam Gabungan Organisasi Wanita, berinteraksi dengan berbagai agama selain Islam. Sedangkan Nasyyatul Aisyiyah mengembangkan karakter anak untuk belajar bagaimana menghargai orang, pendapat orang, maupun menghargai perbedaan melalui pelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Selain itu juga menghadiri acara-acara FKUB, seperti di Gereja Santa Maria dan Pura di Kenjeran, Surabaya. Nasyyatul Aisyiyah di Jawa Timur juga pernah terlibat dalam kegiatan Locus Perdamaian di Malang yang berfokus pada diskusi multikultural untuk anak-anak muda, sebagai bagian dari diseminasi moderasi beragama. Locus perdamaian mengadakan Café Peace (interfaith dialogue sambil minum kopi) bahkan pernah mengundang mantan napiter untuk *sharing* dengan komunitas.

Meskipun belum ada program yang secara spesifik mengarah pada isu perempuan dan ekstremisme, Srikandi Lintas Iman (Srili) berfokus pada peran perempuan dalam membangun

⁷ Modul Penguatan Kapasitas Pemuda dan Perempuan, Ma'arif Institute, 2020.

keadilan, perdamaian, dengan membangun hubungan lintas iman. Srili juga melakukan advokasi kasus intoleransi di Gereja Sedayu serta membuat matrikulasi dengan materi pengenalan konteks agama-agama di Yogyakarta. Muslimat NU memang belum spesifik mengadakan program penanganan dan pencegahan ekstremisme kekerasan namun cenderung melakukan upaya yang mengarah pada promosi kerukunan beragama dan *hubbul wathon* atau cinta tanah air pada kegiatan-kegiatan Himpunan Daiyah Muslimat (HIDMAT).

3. Modalitas ormas perempuan berbasis keagamaan dan non keagamaan dalam upaya pencegahan ekstremisme berkekerasan

Dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, ormas perempuan berbasis keagamaan memiliki modal sosial berupa kader dan juga jaringan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah setempat. Selain itu juga modal budaya serta keterikatan ideologis seseorang terhadap ormas perempuan menjadi faktor pendukung dalam membangun koneksi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya membangun kohesi sosial dan pencegahan ekstremisme berkekerasan. Modal simbolik dimiliki ormas perempuan ketika ideologi dan teologi membentuk sikap inklusif, cara pandang yang anti kekerasan, serta sikap positif terhadap otoritas yang berwenang, dalam hal ini negara dan aparat keamanan. Organisasi sayap perempuan keagamaan selain Islam umumnya bekerja sama dengan organisasi sayap perempuan dari NU dan Muhammadiyah. Mereka masih terlibat sebagai partisipan, belum berperan sebagai pengambil inisiatif dan pelaksana utama program pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

4. Hambatan dalam memaksimalkan upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan

Ormas perempuan berbasis keagamaan yang menginduk pada ormas seperti NU dan Muhammadiyah masih menghadapi berbagai hambatan dalam upaya mempromosikan moderasi beragama, kerukunan antar umat beragama, serta ketahanan terhadap ekstremisme dan radikalisme mencakup:

a. Hambatan Struktural

Secara umum ada perbedaan antara program dan kegiatan yang dilakukan ormas perempuan yang diteliti dengan program dan kegiatan ormas induk yang berada di bawah organisasi yang sama (NU atau Muhammadiyah) yang didominasi oleh laki-laki. Meskipun ormas perempuan keagamaan memiliki otonomi dalam kegiatannya, namun mereka tetap harus menyelaraskan gerak langkah dengan kebijakan organisasi induk. Seringkali mereka terpaksa melepaskan identitas lembaga dan mengatasnamakan pribadi mempromosikan moderasi beragama, kerukunan antarumat beragama, serta mendorong ketahanan komunitas terhadap ekstremisme.

b. Hambatan Kultural

Tantangan dari budaya patriarki juga dihadapi kader ormas perempuan berbasis keagamaan, seperti dianggap melanggar kodrat ketika harus melakukan aktivitas di luar rumah dan

meninggalkan anak-anak mereka. Pandangan ini bisa muncul dari pasangan, keluarga besar ataupun masyarakat

c. Hambatan Internal

Hambatan dalam menyeimbangkan peran domestik dan publik, khususnya untuk aktivis perempuan muda, yang biasanya merupakan keluarga muda, rata-rata ibu muda yang memiliki anak balita. Mereka sering berhalangan hadir karena alasan keluarga, juga kader yang datang mengikuti kegiatan berganti-ganti sehingga pengetahuan tidak berkelanjutan serta menyulitkan untuk kaderisasi.

Hambatan juga datang dari kemampuan para kader ormas perempuan keagamaan dalam menguasai teknologi informasi. Mereka mengalami kesulitan mengimbangi propaganda kalangan ekstremisme berkekerasan yang gencar berdakwah melalui media sosial.

d. Hambatan Eksternal

Beberapa ormas perempuan keagamaan mengakui memiliki hambatan dengan pihak eksternal terkait dengan upaya untuk membangun hubungan dengan kalangan perempuan dari kelompok yang dianggap berbeda secara ideologi. Fatayat NU Jawa Timur menghadapi kesulitan ketika melakukan pendampingan pada perempuan dan anak yang dideportasi dari Turki karena terpapar ekstremisme. Butuh proses yang sangat panjang dan memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk mendudukkan perempuan dan anak sebagai teman. Terkadang upaya tersebut mengalami penolakan. Tantangan juga hadir dari tidak terbukanya masyarakat pada kegiatan yang dihadiri oleh kader ormas perempuan, misalkan pada keluarga deportan atau tokoh masyarakat sendiri yang sulit ditemui.

e. Hambatan Finansial

Ormas perempuan keagamaan mengalami hambatan finansial terkait dengan dana dan kendaraan operasional untuk melakukan kegiatan dakwah ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Beberapa program terkait dengan upaya pencegahan ekstremisme berkekerasan juga masih tergantung dengan pendanaan pihak eksternal. Sehingga seringkali terjadi ketidaksinambungan pada program-program tersebut. Fatayat NU Jawa Timur melakukan pendampingan kepada beberapa orang deportan pada tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018. Namun terkendala ketika pihak eksternal memutuskan untuk tidak melanjutkan program tersebut setelah enam bulan. Program tersebut kemudian berlanjut lagi di tahun 2020. Demikian juga dengan PP Aisyiyah yang pernah menangani dan mendampingi korban dan keluarga korban bom Kuningan, yang terpaksa menghentikan programnya setelah tiga tahun ketika pihak eksternal merasa sudah cukup membantu. Akibat dari itu semua, program-program terkait upaya pencegahan ekstremisme berkekerasan seperti tidak berkesinambungan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Debbie Affianty, *Perempuan dalam Kelompok Teroris dan Terorisme*, dalam Muhammad Abdullah Darraz (Ed), *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2017.
- Kalpana Wilson, *Reclaiming "Agency", Reasserting Resistance*, Institute of Development Studies (IDS) Bulletin Vol. 39, Number 6, December 2008.
- Lies Marcoes, *Merebut Tafsir*, Yogyakarta: Amongkarta, 2021.
- Loic Wacquant, Pierre Bourdieu and Rob Stones (ed.), *Key Contemporary Thinkers*, London and New York: Macmillan, 2006.
- Modul Penguatan Kapasitas Pemuda dan Perempuan, Ma'arif Institute, 2020.
- Nava Nuraniyah, *Not Just Brainwashed: Understanding the Radicalisation of Indonesian Female Supporters of the Islamic State, Terrorism and Political Violence*, 2018.
- Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and The Feminist Subject*, UK: Princeton University Press, 2005.